

ANALISIS YURIDIS HAK ANGKET DPR RI DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN MENURUT HUKUM

TATA NEGARA INDONESIA

**Nani Alifia Hasvianti**

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Panca Marga

[Nanialifia21@gmail.com](mailto:Nanialifia21@gmail.com)

*Abstrak*

Negara Kesatuan Republik Indonesia terkenal dengan Negara yang dikarunai kekayaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia adalah ribuan pulau-pulau indah yang terletak di dalamnya. Sehingga, Negara Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan. Selain disebut sebagai negara kepulauan, Indonesia juga disebut sebagai sebuah Negara Demokrasi dan Negara Hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak angket oleh DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan menurut UU serta mengetahui bagaimana dampak penggunaan hak angker DPRD terhadap kinerja eksekutif. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Dalam pelaksanaannya Hak angket DPR diberikan dalam rangka sebuah fungsi pelaksanaan pengawasan terhadap kekuasaan lainnya demi terwujudnya kekuasaan yang akan jadi berimbang. Dampak penggunaan Hak Angket terhadap kinerja eksekutif ialah DPR melakukan hak angket terhadap lembaga KPK, hal ini tidak akan merubah ataupun mengurangi sifat lembaga Negara independen pada KPK.